

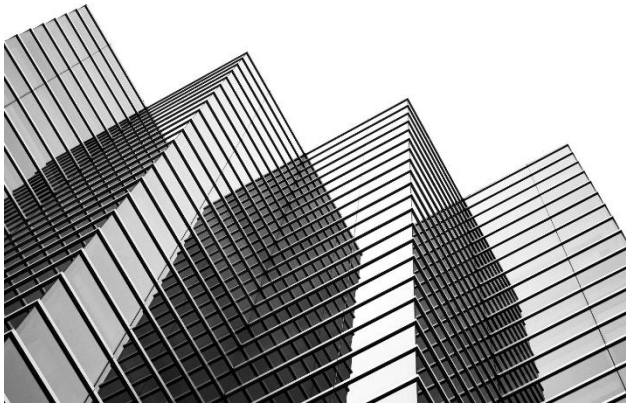
LAMPIRAN

Lampiran 1 E-Book Identifikasi Mekanisme Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Pengungkapan *Sustainability Report* Pada Sektor Industri



Handbook

IDENTIFIKASI MEKANISME PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN
PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT
PADA SEKTOR INDUSTRI



Daftar Isi

- 01 Informasi Umum
- 02 Tinjauan Pustaka
- 03 Hasil Analisis
- 04 Saran
- 05 Daftar Pustaka





Bab I Informasi Umum


1.1 Informasi Umum

Handbook ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan laporan keberlanjutan yang dilaporkan perusahaan dan terdaftar di bursa efek Indonesia. Handbook ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme penerapan good Corporate governance dan pengungkapan sustainability report pada sektor industri.

Good Corporate Governance (GCG) dan pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan dua aspek penting dalam manajemen perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks sektor industri, penerapan GCG yang efektif dapat berkontribusi pada kinerja perusahaan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, dan masyarakat. Di era globalisasi dan meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial, perusahaan dituntut untuk tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Laporan keberlanjutan berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, yang memberikan informasi mengenai kinerja keberlanjutan, strategi, dan dampak dari aktivitas perusahaan. Di Indonesia, implementasi GCG dan pengungkapan laporan keberlanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kedua aspek ini, sehingga pengimplementasiannya seringkali kurang optimal.

Penerapan good corporate governance dan pengungkapan sustainability report menjadi penting bagi perusahaan sektor industri karena memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan dan citra perusahaan di mata publik. Sektor industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri (UU Nomor 5 tahun 1948). Industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat.


Kegiatan proses produksi dalam industri disebut dengan perindustrian. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positif dari sektor industri yaitu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, inovasi dan pengembangan teknologi baru, dan mendorong pembangunan infrastruktur. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh sektor industri dalam kegiatan proses produksi yaitu pencemaran air, polusi udara dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan sehingga perusahaan lebih mementingkan keuntungan daripada dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan produksi yang dilakukan. Sektor industri mencakup perusahaan yang berperan dalam kegiatan ekonomi seperti kedirgantaraan dan pertahanan, produk dan perlengkapan bangunan, listrik, mesin, perdagangan industri yang beragam, layanan komersial, layanan profesional dan yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan di berbagai sektor industri yang berbeda. Sektor industri terdiri dari subsektor Dirgantara & Pertahanan, Produk Bangunan & Perlengkapan, Listrik Mesin, Diversifikasi Industri Jual Beli, Layanan Komersial, Layanan Profesional dan Kepemilikan Multi-sektor.



Menurut The Organization for Economic Corporation and Development (OECD), GCG adalah tata kelola yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban pra pemegang dewan pengurus, para manager dan stakeholder yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua pemangku kepentingan (Wibowo et al. 2010). GCG digunakan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Ada 2 dua hal yang perlu ditekankan dalam konsep ini, yaitu yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan akurat dan tepat waktu dan yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemangku kepentingan dari perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antara pemangku kepentingan dalam perusahaan. Hubungan kondusif antar stakeholder tersebut adalah syarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, mendukung peningkatannya nilai perusahaan (Binus, 2020).

Sustainability report adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari (Global Reporting Initiative, 2019). Saat ini implementasi sustainability report di Indonesia didukung oleh aturan pemerintah seperti UU Perseroan Terbatas (PT) nomor 40 tahun 2007 pasal 74. Sustainability report dan kepatuhan dalam tata kelola perusahaan yang baik mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan serta menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan. Menurut Kurniadi & Wardoyo (2022) tanggung jawab sosial perusahaan adalah strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik cenderung memiliki kinerja yang baik dalam jangka panjang bagi pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 tentang Perseroan Terbatas, komitmen perseroan yaitu bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat terhadap perseroan sendiri dan masyarakat sekitarnya.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/2017 mengenal keuangan keberlanjutan mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan (Grant Thornton, 2023). Keuangan keberlanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Apabila kinerja keuangan berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kinerja lingkungan dan sosial serta berkontribusi nyata untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, di masa mendatang akan menjadi perusahaan yang bertahan (Nofianto dan Agustina, 2014). Apabila sudah banyak kasus akibat kelalaian perusahaan terhadap aspek ini. Informasi terkait aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan perusahaan perlu dilaporkan dalam laporan keberlanjutan atau sering disebut sustainability report.



Bab II Tinjauan Pustaka

2.1 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem, prosedur dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi untuk tercapainya tujuan perusahaan (Hapsari, 2019). Menurut (IAI, 2015) GCG memiliki lima prinsip untuk diterapkan oleh perusahaan. Lima prinsip tersebut, yaitu :

a. Transparansi

Untuk menjalankan bisnis yang baik perusahaan harus menyediakan informasi yang material, relevan, mudah diakses dan mudah di pahami oleh stakeholder. Informasi yang disediakan tidak hanya masalah yang ditentukan oleh Undang-Undang tetapi penting untuk pengambilan keputusan oleh stakeholder.

b. Akuntabilitas

Perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan informasi dan kinerja secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola dengan benar dan sesuai dengan tujuan perusahaan yang memperhatikan kepentingan stakeholder. Akuntabilitas merupakan syarat untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, berlaku untuk direksi sebagai pengelola perusahaan dan dewan komisaris yang mengawasi direksi.

c. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan Undang-Undang dan melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan supaya terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

d. Independensi

Perusahaan harus dikelola dengan independensi supaya tidak mendominasi dan tidak ikut campur terhadap kepentingan tertentu yang bukan kewajibannya.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada setiap stakeholder yang sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan terhadap perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan berpendapat terhadap informasi dengan prinsip transparansi sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang pertama adalah mencapai keuntungan yang maksimal, tujuan kedua adalah memakmurkan pemilik saham, tujuan ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang mencerminkan pada harga saham. Semakin meningkat harga saham, semakin meningkat pula nilai perusahaan.

2.1.1 Mekanisme Good Corporate Governance

Adapun mekanisme GCG, antara lain:

a. Hak Pemegang Saham (*Shareholder Rights*)

Pemiliki modal memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan undang-undang dan anggaran dasar perusahaan. Hak dan tanggung jawab pemegang saham yaitu menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam kehadiran pemegang saham dalam rapat ini, perusahaan harus mengungkapkan calon direktur dan perusahaan harus menggunakan suara kumulatif untuk pemilihan direksi.

b. Dewan Direksi (*Board of Directors*)

Dewan direksi harus menghadiri pertemuan setidaknya 75% dan perusahaan memegang empat atau lebih rapat rutin untuk dewan direksi pertahunnya. Perusahaan harus mengungkapkan dalam laporan tahunannya jika ada peraturan untuk mengatur pertemuan dewan.

c. Komisaris Independen (*Outside Directors*)

Komisaris independen ditunjuk sebagai pengawasan independen atas proses dewan untuk mengurangi konflik keanginan dan meningkatkan kinerja. Komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya.

d. Komite Audit dan Internal Audit (*Audit Committee and Internal Auditor*)

Dewan Komisaris membentuk komite audit untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit bertanggung jawab kepada komisaris dan internal audit bertanggung jawab kepada direktur. Komite audit melakukan pertemuan dua kali atau lebih pertahun dan menghadiri 75% dari pertemuan tersebut. Pada laporan kegiatan komite audit/audit internal ditulis dan dilaporkan pada saat RUPS.

e. Pengungkapan untuk investor (*Disclosure to Investors*)

Perusahaan harus mengungkapkan masalah yang disyaratkan oleh undang-undang. Pengungkapan untuk investor dapat mendorong keyakinan investor dan kreditur dalam menentukan kebijakan investasi yang diambil.

2.1.2 Scoring Good Corporate Governance

Corporate Governance Index (CGI) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik di suatu organisasi. CGI adalah index yang menerapkan prinsi-prinsip GCG untuk mengukur berbagai aspek termasuk transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran & kesetaraan.

CGI menilai kualitas GCG untuk memberikan informasi kuantitatif untuk menilai kualitas tata kelola perusahaan, membantu manajemen dan pemangku kepentingan memahami seberapa baik perusahaan dikelola. Mengidentifikasi mekanisme GCG dapat mendorong perusahaan perusahaan untuk meningkat praktik GCG dan perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang akan cenderung lebih dipercaya oleh investor.

CGI digunakan untuk mengidentifikasi mekanisme GCG perusahaan apakah perusahaan menerapkan praktik GCG didalam perusahaan dengan baik atau tidak. Mekanisme GCG yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan maka di nilai 1 dan mekanisme GCG yang tidak diungkapkan di laporan keberlanjutan diberikan nilai 0.

$$CGI = \frac{A + (B \pm C) + D + E}{2}$$

Keterangan :

A = Hak Pemegang Saham (subindeks A)

B = Dewan Direksi (subindeks B)

C = Komisaris Independen (subindeks C)

D = Komite Audit dan Internal Audit (subindeks D)

E = Pengungkapan untuk Investor (subindeks E)

2.2.2 Pengukuran Pengungkapan Sustainability Reporting

Pengungkapan laporan keberlanjutan dinilai dengan menggunakan prosedur yang digunakan dalam **content analysis** yang mengacu pada metode Consolidated Narrative Interrogation (**CONI**). **Prosedur** yang digunakan dalam CONI untuk pengungkapan lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Coding: Checklist untuk mengukur narasi pengungkapan lingkungan perusahaan yang terdiri dari Standar Universal GRI, Standar Sektor GRI dan Standar Topik GRI. Coding yang dibagikan berupa kode 0 untuk item yang sama sekali tidak diungkapkan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.

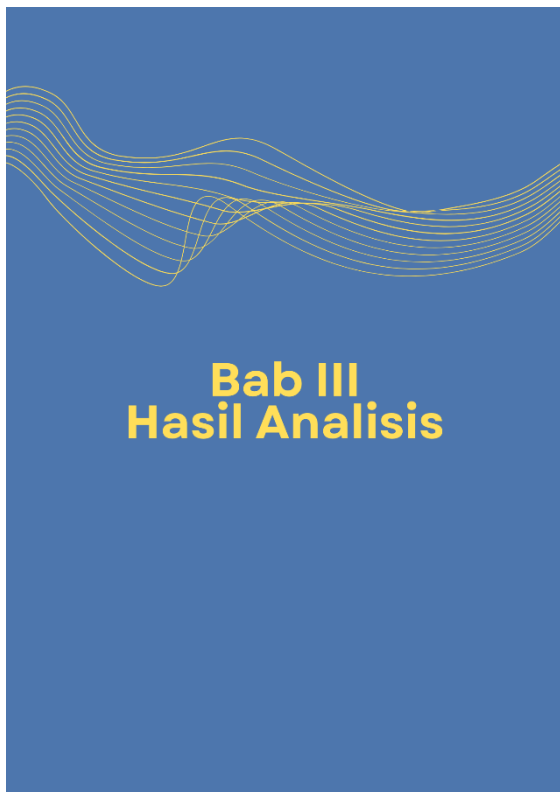
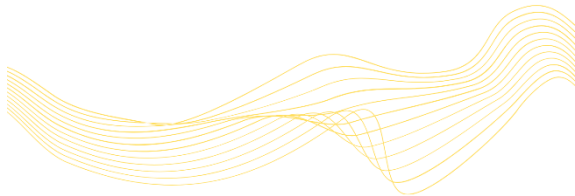
b. Scoring: digunakan untuk mengetahui tingkat pengungkapan indeks kinerja lingkungan perusahaan berdasarkan item-item yang diungkapkan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Scoring dihitung dengan cara:

$$\text{Tingkat Pengungkapan} = \frac{\text{Hasil}}{\text{Total Item}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan tingkat pengungkapan masing-masing perusahaan, yaitu :

0%	= not applied
1% - 40%	= limited disclose
41% - 75%	= partially applied
76% - 99%	= well applied
100%	= fully applied

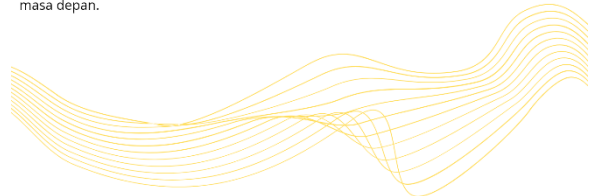
c. Kategori untuk melihat keluasan dan kedalaman pengungkapan lingkungan yang dilaporkan perusahaan dilakukan analisis konten per aspek yang dilaporkan masing-masing perusahaan dan dikategorikan berdasarkan tiga tingkat kualitas pengungkapan.



Penerapan Corporate Governance Index (CGI) dan Sustainability Report (SR) dalam perusahaan sektor industri memiliki implikasi yang luas, mencakup aspek keuangan, reputasi, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap regulasi. CGI mengukur kualitas tata kelola perusahaan, termasuk transparansi, akuntabilitas, perlindungan terhadap hak pemegang saham, serta efektivitas dewan direksi dan komisaris. Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperbaiki akses terhadap pendanaan, dan mengurangi risiko operasional maupun hukum. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa perusahaan industri menunjukkan peningkatan skor CGI dari tahun ke tahun, seperti Astra Graphia Tbk. (ASGR) dan Impact Pratama Industri Tbk. (IMPC), yang menandakan perbaikan dalam praktik tata kelola perusahaan.


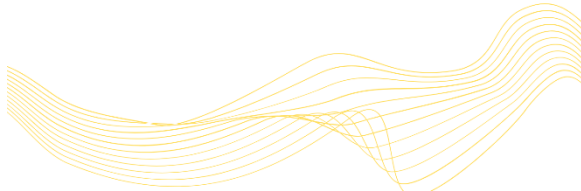
Sementara itu, SR menjadi instrumen penting dalam mengungkapkan kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan, investor dan konsumen semakin memperhatikan perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan dan sosial. Perusahaan industri sering kali memiliki dampak lingkungan yang signifikan, sehingga pengungkapan SR menjadi krusial untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengurangi emisi karbon, efisiensi energi, dan kesejahteraan pekerja.

Sinergi antara GCG dan pengungkapan SR menciptakan ekosistem bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung lebih disiplin dalam mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan, sementara transparansi dalam SR dapat memperkuat GCG dengan meningkatkan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan. Dengan demikian, perusahaan industri yang secara aktif meningkatkan kedua aspek ini tidak hanya memperoleh keunggulan kompetitif tetapi juga lebih tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi, lingkungan, dan sosial di masa depan.





Bab IV Saran

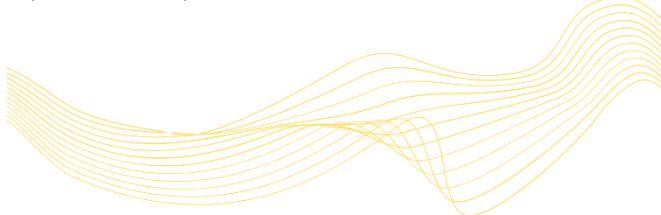
- 
1. Perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia khususnya sektor industri perlu meningkatkan informasi yang relevan.
 2. Perusahaan sebaiknya mengintegrasikan pengungkapan mekanisme good corporate governance ke dalam laporan sustainability report untuk meningkatkan ketertarikan investor terhadap perusahaan.
 3. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang dan peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain yang sesuai dan relevan untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan nilai perusahaan.
- 



Bab V Daftar Pustaka



DAFTAR PUSTAKA

- Binus. 2020. "Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Etika dalam Perusahaan." Bina Nusantara. 2020. <https://accounting.binus.ac.id/2020/06/30/good-corporate-governance-gcg-dan-pedoman-etika-dalam-perusahaan/>.
- Dwiardi, Agung Rahmat. 2021. "Analisis Aspek Aspek Kepatuhan Penyelenggara Pos Di Indonesia Analysis Of Compliance Aspects Of Post Providers." Jppi 11 (1): 21-40. <https://doi.org/10.17933/jppi.2021.110102>.
- Hapsari, Denny Putri. 2019. "Analisis Implementasi Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pt Ns Bluescope Indonesia." TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis 8 (1): 33-49. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.5523>.
- IAI. 2015. Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat. <https://web.iaiglobal.or.id/assets/materi/Sertifikasi/CA/modul/eptkk/index.html#p=7>.
- Juniarti, Zefanya Gwenda. 2013. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Variabel Share Ownership, Debt Ratio, dan Sektor Industri Terhadap Nilai Perusahaan." Business Accounting Review 1 (2): 246-54.
- Kurniadi, Aulia Fatiha, dan Dwi Urip Wardoyo. 2022. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Dalam Perspektif Teori Agensi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020)." Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1 (2): 141-50. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/50>.
- Nofianto, Eko, dan Linda Agustina. 2014. "Analisis Pengaruh Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan." Accounting Analysis Journal 3 (3): 343-51.
- Rossi, Rio Novianto, dan Rosinta Ria Panggabean. 2012. "Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan." Binus Business Review 3 (1): 141. <https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1290>.
- Wibowo, Edi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet, dan Riyadi Surakarta. 2010. "Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia" 10 (2): 129-38.
- 

Lampiran 2 Perhitungan *Good Corporate Governance* dengan menggunakan *Corporate Governance Index*

Indeks	Indikator	Point	Sub Indeks	AMFG			ASGR			ASII			BNBR		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
A	Hak Pemegang Saham (Shareholder Rights)	A.1	Perusahaan menggunakan suara kumulatif ataupun suara mayoritas pemegang saham untuk pemilihan direksi, suara kumulatif merupakan aturan standar dibawah komersial kode	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		A.2	Perusahaan memberitahukan mengadakan pemungutan suara melalui email	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		A.3	Perusahaan harus mengatur strategi pertemuan (tanggal dan tempat) untuk mendorong kehadiran pemegang saham	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		A.4	Perusahaan memberikan informasi calon direktur kepada pemegang saham di pertemuan pemegang saham	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		A.5	Persetujuan dewan diperlukan untuk transaksi terkait. Transaksi yang dimaksud yaitu perusahaan yang termasuk dalam top 30 chaebol, peraturan monopoli dan fair trade act memerlukan persetujuan ini jika transaksi lebih besar dari 10% dari modal ekuitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Dewan Direksi (Board of Directors)	B.1	Dewan Direksi rata-rata menghadiri pertemuan minimal 75%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		B.2	Di agenda rapat dewan, posisi direksi dicatat pada boards minutes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		B.3	Ketua dewan direksi dan CEO adalah orang berbeda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		B.4	Adanya sebuah sistem untuk mengevaluasi adanya direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		B.5	Ada peraturan untuk mengatur pertemuan dewan, Perusahaan harus mengungkapkan pada laporan tahunan apakah memiliki/tidak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
		B.6	Perusahaan memegang empat atau lebih rapat rutin dewan pertahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		C.1	Perusahaan memiliki 30% dewan direksi dari luar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.2	Perusahaan memiliki 1 atau lebih direksi dari luar negeri	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	

Indeks	Indikator	Point	Sub Indeks	AMFG			ASGR			ASII			BNBR		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
C	Komisaris Independen (Outside Directors)	C.3	Perusahaan memiliki komisaris independen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		C.4	Dewan direksi dari luar tidak menerima gaji pensiun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.5	Direktur luar dapat menerima saran dari para ahli di luar perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.6	Pemegang saham menyetujui membayar agregat direksi luar di pertemuan pemegang saham	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.7	Direktur luar rata-rata menghadiri pertemuan minimal 75%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
		C.8	Kode etik untuk direksi luar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.9	Perusahaan telah ditunjuk cotoact oerson untuk mendukung direksi luar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.10	Ada sebuah pertemuan dewan untuk direktur luar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.11	Perusahaan tidak boleh meminjamkan dana kepada komisaris independen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		D.1	Perusahaan memiliki audit komite dan dewan direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
D	Komite Audit dan Internal Audit (Audit Committee and Internal Auditor)	D.2	Adanya anggaran rumah tangga yang mengatur komite audit/ auditor internal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		D.3	Komite audit adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam akuntansi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		D.4	Komite audit/Auditor eksternal merekomendasikan auditor eksternal pada saat pertemuan pemegang saham tahunan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		D.5	Pertemuan komite audit dituliskan dalam board minutes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
		D.6	Laporan kegiatan audit komite di pertemuan tahunan pemegang saham	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		D.7	Rata-rata kehadiran anggota komite audit menghadiri pertemuan minimal 75%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		D.8	Komite audit melakukan pertemuan dengan eksternal audit untuk meninjau laporan keuangan	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0		

Indeks	Indikator	Point	Sub Indeks	AMFG			ASGR			ASII			BNBR		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
E	Pengungkapan untuk investor (Disclosure to Investors)	D.8	Komite audit melakukan pertemuan dengan eksternal audit untuk meninjau laporan keuangan	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
		E.1	Perusahaan melakukan kegiatan investor relations pada tahun tertentu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		E.2	Website perusahaan memiliki resume dari anggota dewan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		E.3	Ada pengungkapan bahasa Inggris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Jumlah Item Pengungkapan yang Dipenuhi (Indeks A)	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3		
			Jumlah Item Pengungkapan yang Dipenuhi (Indeks B)	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5		
			Jumlah Item Pengungkapan yang Dipenuhi (Indeks C)	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1		
			Jumlah Item Pengungkapan yang Dipenuhi (Indeks D)	5	5	5	6	6	6	5	5	5	6		
			Jumlah Item Pengungkapan yang Dipenuhi (Indeks E)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
			Total Indeks A sampai Indeks E	18	18	18	19	19	20	20	20	20	18		
			Scoring GCG	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	16,5	15,5	15,5	15			

Sumber: Data Diolah Penulis

Indeks	Indikator	Point	Sub Indeks	BNBR			IBFN			IMPC			UNTR		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
A	Hak Pemegang Saham (Shareholder Rights)	A.1	Perusahaan menggunakan suara kumulatif ataupun suara mayoritas pemegang saham untuk pemilihan direksi, suara kumulatif merupakan aturan standar dibawah komersial kode	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		A.2	Perusahaan memberitahukan mengadakan pemungutan suara melalui email	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
		A.3	Perusahaan harus mengatur strategi pertemuan (tanggal dan tempat) untuk mendorong kehadiran pemegang saham	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		A.4	Perusahaan memberikan informasi calon direktur kepada pemegang saham di pertemuan pemegang saham	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		A.5	Persetujuan dewan diperlukan untuk transaksi terkait. Transaksi yang dimaksud yaitu perusahaan yang termasuk dalam top 30 chaebol, peraturan monopoli dan fair trade act memerlukan persetujuan ini jika transaksi lebih besar dari 10% dari modal ekuitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Dewan Direksi (Board of Directors)	B.1	Dewan Direksi rata-rata menghadiri pertemuan minimal 75%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		B.2	Di agenda rapat dewan, posisi direksi dicatat pada boards minutes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		B.3	Ketua dewan direksi dan CEO adalah orang berbeda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		B.4	Adanya sebuah sistem untuk mengevaluasi adanya direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		B.5	Ada peraturan untuk mengatur pertemuan dewan, Perusahaan harus mengungkapkan pada laporan tahunan apakah memiliki/tidak	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
		B.6	Perusahaan memegang empat atau lebih rapat rutin dewan pertahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		C.1	Perusahaan memiliki 30% dewan direksi dari luar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.2	Perusahaan memiliki 1 atau lebih direksi dari luar negen	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	

Indeks	Indikator	Point	Sub Indeks	BNBR			IBFN			IMPC			UNTR		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
C	Komisaris Independen (Outside Directors)	C.3	Perusahaan memiliki komisaris independen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		C.4	Dewan direksi dari luar tidak menerima gaji pensiun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.5	Direktur luar dapat menerima saran dari para ahli di luar perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.6	Pemegang saham menyetujui membayar agregat direksi luar di pertemuan pemegang saham	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.7	Direktur luar rata-rata menghadiri pertemuan minimal 75%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
		C.8	Kode etik untuk direksi luar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.9	Perusahaan telah ditunjuk cotact oerson untuk mendukung direksi luar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.10	Ada sebuah pertemuan dewan untuk direktur luar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C.11	Perusahaan tidak boleh meminjamkan dana kepada komisaris independen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		D.1	Perusahaan memiliki audit komite dan dewan direksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
D	Komite Audit dan Internal Audit (Audit Committee and Internal Auditor)	D.2	Adanya anggaran rumah tangga yang mengatur komite audit/ auditor internal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		D.3	Komite audit adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam akuntansi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		D.4	Komite audit/Auditor eksternal merekomendasikan auditor eksternal pada saat pertemuan pemegang saham tahunan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		D.5	Pertemuan komite audit dituliskan dalam board minutes	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1		
		D.6	Laporan kegiatan audit komite di pertemuan tahunan pemegang saham	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		D.7	Rata-rata kehadiran anggota komite audit menghadiri pertemuan minimal 75%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		D.8	Komite audit melakukan pertemuan dengan eksternal audit untuk meninjau laporan keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Indeks	Indikator	Point	Sub Indeks	BNBR			IBFN			IMPC			UNTR		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
E	Pengungkapan untuk investor (Disclosure to Investors)	D.8	Komite audit melakukan pertemuan dengan eksternal audit untuk meninjau laporan keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		E.1	Perusahaan melakukan kegiatan investor relations pada tahun tertentu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		E.2	Website perusahaan memiliki resume dari anggota dewan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		E.3	Ada pengungkapan bahasa Inggris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Jumlah Item Pengungkapan yang Dipenuhi (Indeks A)	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	
			Jumlah Item Pengungkapan yang Dipenuhi (Indeks B)	5	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	
			Jumlah Item Pengungkapan yang Dipenuhi (Indeks C)	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	
			Jumlah Item Pengungkapan yang Dipenuhi (Indeks D)	6	6	6	5	5	5	5	5	6	7	7	
			Jumlah Item Pengungkapan yang Dipenuhi (Indeks E)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Total Indeks A sampai Indeks E	18	18	18	18	18	18	20	21	22	19	19	
			Scoring GCG	15	15	15	14,5	14,5	14,5	15,5	16,5	17,5	16	16	

Sumber: Data Diolah Penulis

Lampiran 3 Pengungkapan Indeks POJK No.51

Keterangan	Kode	Informasi	
Penjelasan strategi berkelanjutan	A.1		Sosial
Ikhtisar kinerja aspek ekonomi	B.1a	Kuantitas produksi atau jasa yang dijual	Ekonomi
	B.1b	Pendapatan atau penjualan	Ekonomi
	B.1c	Laba atau rugi bersih	Ekonomi
	B.1d	Produk ramah lingkungan	Ekonomi
	B.1e	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis keuangan berkelanjutan	Ekonomi
Ikhtisar kinerja aspek lingkungan hidup	B.2a	Penggunaan energi (antara lain listrik dan air)	Lingkungan
	B.2b	Pengurangan emisi yang dihasilkan	Lingkungan
	B.2c	Pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan	Lingkungan
	B.2d	Pelestarian keanekaragaman hayati	Lingkungan
Ikhtisar kinerja aspek sosial	B.3	Uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan keuangan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan	Sosial
Profil Singkat Emiten	C.1	Visi, misi, dan nilai keberlanjutan	Ekonomi
	C.2	Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat email, dan situs web, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan	Ekonomi
	C.3a	Skala usaha: total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban	Ekonomi
	C.3b	Skala usaha: jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan	Sosial
	C.3c	Skala usaha: nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham	Ekonomi
	C.3d	Skala usaha: wilayah operasional	Sosial
	C.4	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan	Ekonomi
	C.5	Keanggotaan pada asosiasi	Sosial
	C.6	Perubahan emiten dan perusahaan publik yang bersifat signifikan, antara lain terkait penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan	Ekonomi
	Penjelasan Direksi	D.1a(1)	Kebijakan: penjelasan nilai keberlanjutan
D.1a(2)		Kebijakan: penjelasan respon emiten terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan	Ekonomi
D.1a(3)		Kebijakan: penjelasan komitmen pimpinan emiten dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;	Ekonomi
D.1a(4)		Kebijakan: pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan	Ekonomi
D.1a(5)		Kebijakan: tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Ekonomi
D.1b(1)		Penerapan Keuangan Berkelanjutan: pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target	Ekonomi
D.1c(1)		Strategi pencapaian target: pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup;	Ekonomi
D.1c(2)		Strategi pencapaian target: pemanfaatan peluang dan prospek usaha	Ekonomi
D.1c(3)		Strategi pencapaian target: penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan emiten	Ekonomi

	E.1	Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Ekonomi
	E.2	Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Ekonomi
	E.3a	Penilaian risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan: Penjelasan mengenai prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan usaha keberlanjutan terkait aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial	Ekonomi
	E.3b	Penilaian risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan: Penjelasan peran anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko yang dijalankan oleh Emiten dan Perusahaan Publik.	Ekonomi
	E.4a	Pemangku kepentingan: keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya	Ekonomi

	E.4b	Pemangku kepentingan: pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.	Ekonomi
Tata Kelola Keberlanjutan	E.5	Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Ekonomi
	F.1	Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.	Ekonomi
	F.2	Kinerja ekonomi (3 tahun): perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan	Ekonomi
	F.3	Kinerja ekonomi (3 tahun): perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Ekonomi
	F.4	Biaya Lingkungan Hidup	Ekonomi
	F.5	Aspek Material: Penggunaan material yang ramah lingkungan	Lingkungan
	F.6	Aspek Energi: Jumlah dan intensitas energi yang digunakan	Lingkungan
	F.7	Aspek Energi: Upaya dan pencapaian efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan	Lingkungan

	F.8	Aspek air: penggunaan air	Lingkungan
	F.9	Aspek keanekaragaman hayati: Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	Lingkungan
	F.10	Aspek keanekaragaman hayati: usaha konservasi keanekaragaman hayati	Lingkungan
	F.11	Aspek emisi: jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	Lingkungan
	F.12	Aspek emisi: upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan	Lingkungan
	F.13	Aspek limbah dan efluen: jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis	Lingkungan
	F.14	Aspek limbah: mekanisme pengelolaan limbah dan efluen	Lingkungan
	F.15	Aspek limbah: tumpahan yang terjadi (jika ada)	Lingkungan
	F.16	Aspek pengaduan terkait lingkungan hidup: Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan	Lingkungan
	F.17	Kinerja sosial (3 tahun): Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.	Sosial
	F.18	Aspek ketenagakerjaan: kesetaraan kesempatan bekerja	Sosial
	F.19	Aspek ketenagakerjaan: tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa	Sosial
	F.20	Aspek ketenagakerjaan: upah minimum regional	Sosial
	F.21	Aspek ketenagakerjaan: lingkungan bekerja yang layak dan aman	Sosial
	F.22	Aspek ketenagakerjaan: pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	Sosial
	F.23	Aspek masyarakat: dampak operasi terhadap masyarakat sekitar	Sosial
	F.24	Aspek masyarakat: pengaduan masyarakat	Sosial
	F.25	Aspek masyarakat: kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL)	Sosial
	F.26	Tanggung jawab pengembangan produk/jasa berkelanjutan: inovasi dan pengembangan produk/jasa keuangan berkelanjutan	
	F.27	Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan: jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan;	
	F.28	Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan: dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif;	Ekonomi
	F.29	Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan: jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya	Ekonomi
	F.30	Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan: survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.	Ekonomi
Kinerja Keberlanjutan	G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)	Sosial
	G.2	Lembar umpan balik	Sosial
	G.3	Tanggapan terhadap umpan balik laporan keberlanjutan tahun sebelumnya	Sosial
Lain-lain	G.4	Daftar pengungkapan sesuai POJK 51/POJK.03/2017	Ekonomi

Sumber: POJK No.51/POJK.03/2017

Lampiran 4 Pengukuran PJOK 51

Kualitas	Tipe	Deskripsi
<i>Low Quality</i>	1	Murni Naratif
	2	Murni Naratif dengan Penjelasan Spesifik
<i>Moderate Quality</i>	3	Murni Kuantitatif
<i>High Quality</i>	4	Kuantitatif dengan Penjelasan Kualitatif
	5	Kompleks berupa Kualitatif, Kuantitatif dan Komperasi

Sumber: POJK No.51/POJK.03/2017